

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Implementasi Akuntabilitas, Transparansi, dan Tanggung Jawab Program Bantuan Sosial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar” ditulis oleh Umi Ni’matun Nada, NIM 126403202153, Jurusan Akuntansi Syariah, Pembimbing Bapak Ahmad Budiman, M.S.I

Latar belakang penelitian ini Salah satu prioritas pembangunan sektor sosial adalah pemerintah meningkatkan jaminan dan kesejahteraan sosial, khususnya perlindungan kelompok penduduk miskin melalui bantuan sosial PKH. Masyarakat membutuhkannya untuk mencapai kepentingan dan kesejahteraan sosial. Pada saat ini keinginan masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik yang akuntabel, transparan, dan tanggung jawab.

Tujuan dari penelitian ini 1) Untuk mendeskripsikan implementasi akuntabilitas program bantuan sosial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. 2) Untuk mendeskripsikan implementasi transparansi program bantuan sosial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. 3) Untuk mendeskripsikan implementasi tanggung jawab program bantuan sosial di Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya deskriptif. Pada penelitian ini menggunakan data skunder dan primer. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis dan diolah secara sistematis sehingga memperoleh uji keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas program bantuan sosial PKH berupa adanya Sistem DTKS sebagai database yang mengumpulkan informasi tentang keluarga yang menerima bantuan sosial dan rentan serta SIKS-NG sebagai platform yang digunakan untuk mengelola dan mengintegrasikan data, memastikan bahwa program-program sosial memiliki informasi terbaru dan akurat. Transparansi program bantuan sosial PKH penerimaan bantuan sosial dapat dicek diplatform [cekbansos.kemensos.go.id](http://cekbansos.kemensos.go.id), penerimaan bantuan sosial PKH setiap KPM berbeda-beda tergantung komponennya masing-masing, pencairan dilakukan 2 bulan sekali di Bank BNI. Tanggung jawab program bantuan sosial PKH pendamping bersama operator desa/kelurahan membuat forum untuk melakukan pemutakhiran data, verifikasi, dan validasi penerima manfaat, sehingga memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran dan efisien melalui aplikasi SIKS-NG.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Transparansi, PKH

## ABSTRACT

*Thesis with the title “Implementation of Accountability, Transparency, and Responsibility of the Soisal Assistance Program in Wonodadi District, Blitar Regency” written by Umi Ni'matun Nada, NIM 126403202153, Sharia Accounting Department, Supervisor Mr. Ahmad Budiman, M.S.I.*

*The background of this study One of the priorities of social sector development is that the government increases social security and welfare, especially the protection of poor population groups through PKH social assistance. The community needs it to achieve social interests and welfare. At this time the public's desire to obtain public services that are accountable, transparent, and responsible.*

*The purpose of this research 1) To describe the implementation of social assistance program accountability in Wonodadi District, Blitar Regency. 2) To describe the implementation of the transparency of the social assistance program in Wonodadi Subdistrict, Blitar Regency. 3) To describe the implementation of the responsibility of the social assistance program in Wonodadi Subdistrict, Blitar Regency.*

*This research uses a qualitative approach and the type of research is descriptive. This research uses secondary and primary data. The data was collected through interviews, observations, and documentation and then analyzed and processed systematically so as to obtain a data validity test.*

*The results showed the accountability of the PKH social assistance program in the form of the DTKS System as a database that collects information about families receiving social assistance and vulnerable and SIKS-NGas a platform used to manage and integrate data, ensuring that social programs have the latest and accurate information. The transparency of the PKH social assistance program, the receipt of social assistance can be checked on the [checkbansos.kemensos.go.id](http://checkbansos.kemensos.go.id) platform, the receipt of PKH social assistance for each KPM varies depending on the respective components, disbursements are made once every 2 months at Bank BNI. The responsibility of the PKH social assistance program is that the facilitator together with the village / kelurahan operator create a forum to update data, verify and validate beneficiaries, thus ensuring the distribution of targeted and efficient assistance through the SIKS-NGapplication.*

*Key words: Accountability, Responsibility, Transparency, PKH*